

## **KEPENTINGAN NASIONAL PERANCIS MELALUI PENINGKATAN KERJA**

### **SAMA PERTAHANAN DENGAN INDONESIA TAHUN 2017 – 2020**

**Ridho Danang Perkasa<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

#### **ABSTRACT**

The French government recognizes several benefits and national interests gained from the enhanced defense cooperation with Indonesia through the Letter of Intent from 2017 to 2020. Overall, the cooperation between France and Indonesia is a strategic step that reflects France's efforts to strengthen its position in the Asia-Pacific region, which is the center of global economic growth. Moreover, the national interests that France seeks to achieve include expanding the defense market, collaborating on defense technology and innovation, developing defense infrastructure, and strengthening strategic diplomatic relations. In conducting identification and analysis, this research applies the neo-realism approach, international interests, the concept of international cooperation, and defense cooperation. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, and the data collection techniques involve literature review and observation, emphasizing the researcher's search for factual sources.

Keywords: National Interests, France, Defense Cooperation, Indonesia..

#### **ABSTRAK**

Pemerintah Perancis melihat adanya beberapa keuntungan dan kepentingan nasional yang didapatkan dari adanya peningkatan Kerjasama pertahanan dengan Indonesia melalui *Letter of Intent* tahun 2017 – 2020. Secara keseluruhan, kerja sama antara Perancis dan Indonesia adalah langkah strategis yang mencerminkan upaya Perancis untuk memperkuat posisinya di kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, kepentingan nasional yang ingin dicapai Perancis adalah ekspansi pasar pertahanan, kolaborasi teknologi dan inovasi pertahanan, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan hubungan diplomatik strategis. Dalam melakukan identifikasi dan analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan neo-realisme, kepentingan internasional, konsep kerja sama internasional, dan konsep kerja sama pertahanan. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literatur dan menggunakan observasi atau teknik ini menekankan pada pencarian peneliti terhadap sumber-sumber factual.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Perancis, Kerjasama Pertahanan, Indonesia.

#### **PENDAHULUAN**

Keamanan telah menjadi isu penting bagi setiap negara dalam menghadapi dinamika dunia internasional. Sebagai simbol kedaulatan sebuah negara, namun, tidak semua negara mampu menjaga keamanannya sendiri, sehingga kerja sama internasional di bidang keamanan dan pertahanan menjadi hal yang sangat penting. Kerja sama pertahanan adalah bagian dari hubungan internasional, yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi strategis antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri, seperti terorisme, pelanggaran batas wilayah, dan

spionase. Untuk mengatasi ancaman ini, Indonesia menerapkan Kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF), yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan nasional dengan strategi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan alutsista. Sesuai dengan Perpres Nomor No. 5 Tahun 2010 MEF merupakan misi pembangunan nasional yang berfokus pada pertahanan dan keamanan yang ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014, MEF merupakan strategi pembentukan kekuatan untuk mengembangkan komponen-komponen kunci menuju suatu cita-cita, dan tidak dimaksudkan sebagai konsep perlombaan senjata atau strategi pembentukan kekuatan untuk memenangkan perang total, melainkan strategi pembentukan kekuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam memenuhi strategi tersebut, Indonesia saat ini telah melaksanakan kerjasama keamanan dan pertahanan dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Turki, Jepang, dan Perancis.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis di bidang pertahanan dimulai sejak tahun 1950 dan terus berkembang. Terjalannya hubungan bilateral antar kedua negara ini dilandasi dengan adanya kesamaan prinsip dalam sistem politik luar negeri yang dianut Indonesia dan Perancis menjadi faktor pendukung semakin kuatnya hubungan kedua negara. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. tidak terikat pada kekuasaan tertentu. Sedangkan sistem politik Perancis yang independen saat ini berlaku di Perancis yaitu *Politique Independence France* dimana warga negara mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip inilah yang menjadi dasar terjalannya hubungan diplomatik antara Perancis dan Indonesia.

Salah satu tonggak penting adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada tahun 1996, yang mencakup kerja sama di bidang peralatan dan industri pertahanan. Perancis, sebagai negara dengan kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Bagi Indonesia, Perancis adalah salah satu negara yang berperan dalam membantu pengembangan sektor pertahanan melalui berbagai bentuk kerja sama, termasuk dalam industri dan inovasi pertahanan. Berselang 16 Tahun setelah penandatanganan MOU kerja sama tersebut, pada tahun 2012 dimulailah inisiasi tentang *Indonesia-French Defense Dialogue* (IFDD) yang merupakan ajang untuk menjalin kerjasama pertahanan dan militer antar kedua negara. Dalam forum dialog tersebut, terbentuk tiga kelompok kerja yaitu, *Military Cooperation*, *Strategic Views*, dan

*Defence Industry*. Peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis diperkuat dengan adanya *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2017, yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral di bidang keamanan. Hal ini diikuti dengan kesepakatan lebih lanjut pada tahun 2020, terjadi penandatanganan kesepakatan mengenai Persetujuan Kerja Sama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia-Perancis. Tujuan adanya kerjasama tersebut guna memperluas jangkauan kerja sama pertahanan Indonesia dan Perancis di berbagai bidang, seperti pendidikan dan pelatihan militer, pertukaran ilmu pengetahuan, serta produksi alutsista. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem pertahanan Indonesia, tetapi juga memungkinkan kedua negara untuk berbagi teknologi dan keahlian, serta memperkuat industri pertahanan masing-masing.

Dalam mewujudkan kepentingan Perancis dalam memperkuat sektor pertahanan dan keamanan yang dimilikinya, Perancis melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam sektor pengembangan industri pertahanan. Perancis memandang kerja sama ini sebagai cara untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik, sambil memanfaatkan potensi besar Indonesia sebagai pasar industri pertahanan. Bagi Indonesia, kerja sama ini adalah kesempatan untuk memperkuat kemampuannya, yang menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ancaman global. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, penguatan kerja sama di bidang pertahanan modern menjadi krusial bagi kedua negara untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sehingga penelitian ini bertujuan mengerucutkan kompleksitas masalah terhadap pendalaman dan analisa kepentingan nasional bagi Perancis dalam peningkatan kerjasama dengan Indonesia di tahun 2017 hingga 2020.

## **KERANGKA ANALITIK**

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Realisme klasik sebagai pisau analisis utama. Pemikiran Neo-realisme meyakini bahwa cenderung berfokus pada politik negara-negara besar saja, karena negara besarlah yang memiliki kekuatan untuk mengatur sistem internasional. (Rosyidin, 2020) Kenneth Waltz menjelaskan bahwa Sistem internasional tidak memiliki otoritas pusat yang mengatur interaksi antar negara. Di dunia yang kacau ini, setiap negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya. Dimana dalam penelitian ini akan berkaitan erat dengan analisa kepentingan nasional dan kerja

sama pertahanan yang dilakukan oleh Perancis dan Indonesia untuk bersama-sama dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya. (Waltz, 1979)

Dalam penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang memiliki arti sebagai tujuan dari suatu negara dengan melihat kondisi negaranya. Karena dibalik adanya kerjasama internasional pasti tersirat suatu kepentingan yang diinginkan suatu negara. Penelitian ini juga menggunakan konsep kerjasama internasional sehingga peneliti memahami bagaimana letak kepentingan Perancis dalam peningkatan kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Serta dibutuhkan, konsep kerja sama pertahanan sebagai kerangka pemikiran yang mendukung penelitian ini lebih lanjut. Winger menjelaskan mengenai Kerjasama pertahanan yang diartikan sebagai cara atau proses damai institusi pertahanan dari suatu negara yang melakukan Kerjasama dengan institusi pertahanan negara lain yang berguna dalam mendapat hasil atau kepentingan yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan hasil.

## **PEMBAHASAN**

Ruang lingkup kerjasama yang terjalin antara Perancis dan Indonesia dapat dikatakan cukup luas yaitu pada bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, kebudayaan dan pariwisata, serta pengurangan dampak perubahan iklim. Bidang pada kerjasama tersebut menjadi lima pilar penting dalam hubungan bilateral bagi kedua negara. (Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris - Perancis, 2024) Dalam bidang pertahanan, Perancis dan Indonesia memulai Kerjasama sejak tahun 1996 dalam MoU Kerjasama bidang pertahanan. Adapun Kerjasama ini berlangsung dengan baik. Dan pada tahun 2017, Menhan Indonesia dengan Menhan Perancis menandatangani *Letter of Intent* mengenai peningkatan Kerjasama pertahanan.

## A. Kondisi Pertahanan Perancis

Pertahanan Nasional Perancis memiliki beberapa prinsip, yaitu kemerdekaan, kelengkapan, keabadian, unit, dan dekonsentrasi. (Ministere des Armees, 2024) Kemerdekaan dalam prinsip pertahanan nasional Perancis memiliki arti tidak bergantung pada negara lain untuk memastikan pertahanannya. Kelengkapan menyangkut seluruh warga negara dan seluruh sektor kehidupan negara. Sistem pertahanan Perancis meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Garda Nasional, dan Gendarmeri Republik Perancis, yang seluruhnya dikepalai dan dipimpin oleh Presiden Republik Perancis. Perancis adalah salah satu negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia, yaitu berada di peringkat kedelapan pada 2020 dan terus meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi dari kondisi geopolitik dan kapasitas pengeluaran militer untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Anggaran pertahanan ini sejalan dengan kekuatan militer Perancis yang menempati peringkat keenam di dunia dengan total pasukan lebih dari 300 ribu orang. Kapasitas dengan jumlah tersebut tidak sebanding dengan Amerika Serikat lebih dari 1,3 juta orang, akan tetapi Perancis memiliki personel yang terlatih, profesional, dan dapat memproyeksikan kekuatan militer negara tersebut.

Industri pertahanan Perancis mengalami kemajuan dan keunggulan dan terus berkembang sehingga menghadirkan permintaan impor dari banyak negara dalam pengadaan senjata. Selain itu, sistem pertahanan Perancis juga terfokus pada pengembangan nuklir. Sampai saat ini, Perancis memiliki lebih dari 300 senjata nuklir yang disimpan dalam *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBMs), pengembangan senjata ini bertujuan untuk kepentingan deterrence dan reliabilitas, serta teknik penyamaran senjata sehingga membuat Perancis menjadi target yang sulit. (Vaisse, 2021)

Dalam upaya mengembangkan dan melindungi sistem pertahanannya, Perancis juga memiliki kebijakan pertahanan yang bertujuan untuk memastikan keutuhan wilayah dan perlindungan penduduk dari agresi bersenjata. Kebijakan pertahanan ini berkontribusi pada perang melawan ancaman lain yang dapat membahayakan keamanan nasional serta penghormatan terhadap aliansi, perjanjian nasional maupun internasional, serta mengambil bagian dalam kerangka perjanjian Eropa yang berlaku. Pada era 1960-an, di bawah kepemimpinan Presiden Charles de Gaulle, kebijakan pertahanan Perancis sangat berfokus pada perlindungan wilayah dan kedaulatan negara. Kebijakan tersebut menekankan pengembangan senjata nuklir sebagai strategi *deterrence* untuk memperkuat citra kekuatan

nasional Perancis. (Grant, 1985) De Gaulle meragukan perlindungan nuklir Amerika Serikat, sehingga ia memutuskan untuk membangun kekuatan nuklir independen. Tujuannya adalah memastikan Prancis tidak bergantung pada aliansi seperti NATO dan dapat menjaga otonomi dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, ia berpendapat bahwa kerja sama militer terintegrasi dapat menjadi risiko bagi Prancis karena tidak ada jaminan bahwa negara-negara sekutu akan melindungi kepentingan nasional Prancis dalam kondisi perang. Transformasi kebijakan pertahanan Prancis dari era de Gaulle hingga saat ini menunjukkan penyesuaian strategi terhadap dinamika ancaman global. Pada masa de Gaulle, fokusnya lebih pada kemandirian pertahanan nuklir, sementara saat ini Prancis mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, dengan menyesuaikan diri terhadap ancaman modern, seperti siber dan terorisme, sambil tetap berkomitmen pada peran pentingnya dalam stabilitas Eropa dan keamanan internasional.

*White Paper 2008* menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan Prancis, yang mulai mencakup isu-isu keamanan kontemporer, seperti terorisme, ancaman misil balistik, serangan siber, dan krisis lingkungan. (Fiott, 2008) *White Paper 2013* memperkuat arah ini dengan mengurangi jumlah personel militer sebesar 24 ribu orang dan menyesuaikan anggaran pertahanan, meskipun tetap menjadi salah satu anggaran terbesar di NATO. Dalam *White Paper 2013* ini, menegaskan: “Strategi pertahanan dan keamanan nasional kita tidak dapat dipahami di luar kerangka Aliansi Atlantik dan keterlibatan kita di Uni Eropa.” Strategi pertahanan dan keamanan nasional Prancis bertujuan untuk menggabungkan aspek paling positif dari otonomi strategisnya, komitmen penuhnya kepada Aliansi Atlantik dan organisasi militernya, NATO, dan kesukarelaannya terhadap pengembangan kebijakan keamanan dan pertahanan bersama yang ambisius untuk Uni Eropa. (Ministry of Defense of France, 2024)

Perancis memiliki kontribusi dalam keamanan dan pertahanan beberapa negara di kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Perancis mendukung keterlibatan kehadiran aktif, pengembangan kemitraan strategis dan intensifikasi jaringan kerja sama pertahanannya. Di kawasan Pasifik, Perancis mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kekuatan politik dan maritim secara keseluruhan dan juga menandatangani perjanjian Kerjasama strategis dengan Australia pada tahun 2012, yang berarti menandai adanya pertumbuhan konvergensi kepentingan kedua negara pada banyak masalah internasional dan regional yang terkait dengan Pasifik dan Samudra Hindia.

## **B. Kepentingan Nasional Perancis**

Letter of Intent (LoI) antara Prancis dan Indonesia dalam bidang pertahanan pada periode 2017-2020 merupakan dokumen strategis yang mencerminkan berbagai kepentingan nasional dan strategis Prancis. LoI ini memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan mencapai sejumlah tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan kepentingan geopolitik Prancis di kawasan Asia-Pasifik. LoI ini tidak hanya memenuhi kepentingan nasional Prancis dalam hal keamanan, ekonomi, dan diplomasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hubungan yang solid dan berkelanjutan dengan Indonesia. Melalui kerjasama ini, Prancis berupaya untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dalam hal pengaruh geopolitik, kemajuan teknologi, dan stabilitas regional, serta memperkuat perannya sebagai aktor utama dalam diplomasi pertahanan global.

Kawasan Asia-Pasifik memiliki potensi ekonomi yang besar dan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, kawasan Asia-Pasifik juga memiliki dinamika geopolitik yang kompleks, dengan berbagai isu keamanan yang memerlukan perhatian dan kerjasama internasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kompleks, Prancis menyadari pentingnya kerjasama dengan berbagai negara untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Prancis berupaya tidak hanya meningkatkan kapabilitas pertahanan dan ekonomi melalui ekspansi pasar dan inovasi teknologi, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan kemitraan strategis. Prancis memastikan bahwa hubungannya dengan Indonesia saling menguntungkan bagi kedua negara, serta dapat saling mencapai kepentingan nasional masing-masing.

Menurut K. J. Holsti, kepentingan nasional dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu Core Values, Middle-Range Objectives, dan Long-Range Goals. Begitupun dengan Perancis dalam penguatan kerjasama pertahanan dengan Indonesia melalui LoI pada tahun 2017-2020 juga memiliki kepentingan sesuai dengan pembagiannya.

### **Core Values**

Core values merupakan hal esensial bagi keberlangsungan negara, terutama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Pada tataran ini, negara seperti Prancis memprioritaskan perlindungan wilayah dan kedaulatan politik dari berbagai ancaman. Dalam konteks kerja sama pertahanan antara Prancis dan Indonesia, melalui *Letter of Intent* (LoI), ada langkah signifikan yang diambil untuk mengakomodasi kepentingan jangka

pendek kedua negara. LoI ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan kedua belah pihak, dengan memperluas perjanjian yang sudah ada melalui modernisasi sistem pertahanan, peningkatan latihan militer bersama, serta kolaborasi teknologi dan inovasi.

Kolaborasi dalam hal teknologi dan inovasi merupakan salah satu aspek utama dari LoI ini. Prancis, yang dikenal sebagai pemimpin dalam industri pertahanan, berupaya memperkuat hubungan dengan Indonesia melalui transfer teknologi, pengembangan penelitian (R&D), serta pelatihan personel militer. Transfer teknologi tidak hanya meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan dorongan bagi inovasi dalam industri pertahanan Prancis. Prancis berusaha untuk mengembangkan kapabilitas bersama dengan Indonesia, memungkinkan kedua negara untuk saling menguntungkan dari kemajuan teknologi yang dihasilkan melalui penelitian bersama. Selain itu, Prancis memastikan bahwa teknologi yang diberikan dapat digunakan secara optimal melalui pelatihan yang tepat bagi personel militer Indonesia.

Kerjasama ini juga memberikan keuntungan strategis bagi kedua negara dalam jangka panjang. Dengan adanya transfer teknologi, Indonesia dapat membangun kapasitas teknologi domestiknya, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya. Bagi Prancis, kerjasama ini merupakan peluang untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia-Pasifik serta mempertahankan posisi sebagai pemain utama dalam industri pertahanan global.

### **Middle-range Objective**

Holsti menjelaskan pada indikator sebelumnya mengenai *self-preservation* dimana akan berimplikasi pada kepentingan jangka selanjutnya. Oleh sebab itu berbeda dengan kepentingan jangka pendek, Negara mempunyai agenda kepentingan nasional jangka menengah atau *Middle Range Objectives* yang akan dicapai dalam waktu yang lebih lama. (Holsti, 1998) Berdasarkan penjabaran Holsti, tindakan yang kerap dilakukan oleh negara selain kepentingan militernya adalah pembangunan ekonomi. Sesuai dengan LoI Antara Perancis dan Indonesia, maka pembangunan ekonomi nasional Perancis dapat dilihat melalui kepentingan sebelumnya dari perkembangan industri pertahanan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan kepentingan nasional ekonomi Perancis terhadap Indonesia melalui LoI ini adalah memperluas atau ekspansi pasar industri pertahanan. LoI ini membuka akses bagi Prancis untuk memasarkan produk dan teknologi mutakhirnya, seperti pesawat tempur,

kapal perang, dan sistem pertahanan lainnya, ke pasar Indonesia. Ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi industri pertahanan Prancis, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai penyedia utama dalam pasar global yang sangat kompetitif. Melalui LoI ini juga menjadikan Perancis memiliki nilai prestis di kancah internasional.

### **Long-range Goals**

Terdapat beberapa kepentingan Perancis dalam jangka panjang adalah dalam keamanan regional. Kepentingan Keamanan Regional juga merupakan faktor penting dalam LoI ini. Prancis memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan wilayah dengan dinamika keamanan maritim dan geopolitik yang kompleks. Melalui LoI ini, Prancis berkomitmen untuk berkontribusi pada keamanan regional dengan mendukung kapasitas pertahanan Indonesia. Dengan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, Prancis turut membantu mengurangi potensi konflik dan memastikan stabilitas di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan. Kepentingan ini juga sejalan dengan peran Prancis sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, yang terlibat aktif dalam berbagai isu keamanan global dan regional.

Melalui kerjasama pertahanan ini, Prancis bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik yang sangat strategis secara geopolitik. Dengan memperkuat aliansi dengan Indonesia, Prancis dapat memperluas jangkauan pengaruhnya di kawasan yang dinamis dan berkembang ini. Ini tidak hanya memperkuat posisi diplomatik Prancis, tetapi juga membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang lain, termasuk ekonomi dan politik. Dengan memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia, Prancis dapat lebih mudah mengakses pasar-pasar lain di Asia- Pasifik dan membangun jaringan kerjasama yang lebih luas. LoI kerjasama pertahanan ini tidak hanya bermanfaat bagi kerjasama pertahanan, tetapi juga mendukung kepentingan diplomatik dan politik Prancis di tingkat global. Kemudian terdapat kepentingan lain, yaitu peningkatan kerjasama multilateral, ini mendukung posisi Prancis sebagai aktor global yang berperan dalam diplomasi pertahanan dan keamanan, serta membantu dalam membangun koalisi dan aliansi yang mendukung kepentingan globalnya.

### **C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Kerjasama Pertahanan**

Diplomasi pertahanan adalah alat dalam pencapaian tujuan politik luar negeri suatu negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa hambatan. Dalam hal ini adalah peningkatan kerjasama Perancis dengan Indonesia melalui Letter of Intent pada tahun 2017 – 2020. Hambatan yang terbesar adalah dari jarak geografis antara Perancis dan Indonesia yang mencapai 11 ribu kilometer atau dengan bahasa lain jika ditempuh melalui jalur udara dapat memakan waktu hingga 13 jam. Kondisi tersebut membuat kerja sama secara langsung dalam bentuk pelatihan ataupun pendidikan bersama menjadi terkendala untuk dilakukan karena besarnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali perjalanan. Perbedaan pendapat fokus pertahanan juga merupakan hambatan dalam kerja sama kedua negara ini. Perancis lebih mengutamakan kepentingan dari dua organisasi regional, sebagai anggota NATO dan Uni Eropa. Sedangkan Indonesia juga memiliki fokus pertahanan yang terletak pada kawasan di sekitarnya, yaitu Asia Tenggara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Perancis melihat terdapat beberapa keuntungan dan kepentingan nasional yang didapatkan dari adanya peningkatan Kerjasama pertahanan melalui Letter of Intent tahun 2017 – 2020, karena pada dasarnya dibalik dari adanya Kerjasama bilateral ataupun multilateral, terdapat kepentingan dari masing masing negara. Secara keseluruhan, *Letter of Intent* (LoI) 2017-2020 antara Perancis dan Indonesia adalah langkah strategis yang mencerminkan upaya Perancis untuk memperkuat posisinya di kawasan Asia-Pasifik. Kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Akan tetapi dalam menjalankan Kerjasama ini terdapat beberapa kendala seperti jarak geografis antara Perancis dengan Indonesia yang dapat dikatakan sangat jauh yaitu lebih dari 11 ribu kilometer atau dengan waktu tempuh udara hingga 13 jam. Selain itu fokus pertahanan kedua negara ini juga berbeda, seperti Perancis yang adalah keanggotaan dari NATO dan Uni Eropa serta Indonesia merupakan keanggotaan ASEAN. Yang mana organisasi-organisasi multinasional ini memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

Oleh karena adanya hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah supaya kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dengan dengan meningkatkan teknologi transportasi dalam mengatasi kendala terkait jarak di antara kedua negara. Semakin majunya transportasi akan mempermudah akomodasi di antara kedua negara yang dampaknya dapat memperbesar

intensitas kerja sama. Kemudian, berupaya meningkatkan volume *transfer of technology* dan *knowledge* bagi Indonesia dalam peningkatan pengadaan alutsista dari Prancis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Grant, R. (1985). *French Defense Policy and European Security*. Paris: Political Science Quarterly.
- Holsti, K. J. (1998). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional; dari perspektif klasik sampai non-barat*. Depok : Rajawali Press.
- Vaisse, J. (2021). French Views on Missile Defense. *Brookings*, 7.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

### Jurnal

- Fiott, D. (2008). French White Paper on Defence and National Security: Peacebuilding, NATO, Nuclear Weapons and Space. *ResearchGate*, 9.

### Internet

- Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris - Perancis. (2024, Juli 19). Hubungan Bilateral Perancis - Indonesia. Jakarta, Jawa Barat, Indonesia. Retrieved from <https://international.sindonews.com/berita/1212797/40/sepak-terjang-militan-indonesia-di-marawi-memikat-loyalis-isis>
- Ministere des Armees. (2024, Juli 20). *La Defense* . Retrieved from defense.gouv.fr: <https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profil/jeunes/la-defense>
- Ministry of Defense of France. (2024, Juli 19). *The White Paper on Defence and National Security*. Retrieved from defense.gouv.fr.